BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pertambangan merupakan industri yang dapat memberikan manfaat ekonomi tinggi. Penggalan terhadap sumber-sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sumber keuangan negara.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam ini lebih dikenal dengan mineral dan batubara (minerba). Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.¹ Kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk itulah maka

¹ Absar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 9

pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sehingga terdapat keseimbangan dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 12 Januari 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia telah memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti serta mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yang pokoknya ialah menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang hak dan kewajiban Izin Usaha Pertambangan, salah satu kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) guna meminimalisir dampak negatif tersebut diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) sampai (3) yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.

² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan : Dibawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 15

- 2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
- 3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan pemegang hak atas tanah.³

Saat ini munculnya tambang rakyat di daerah yang ada di Indonesia menjadi semakin buruknya sistem pengelolaan pertambangan, mengingat tambang rakyat banyak yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan hasil pertambangan. Sebagaimana diketahui apabila kegiatan usaha pertambangan mengabaikan kelestarian lingkungan, maka tidak sesuai dengan Pasal 33 (Ayat 4) Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945, bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Mengabaikan kelestarian lingkungan yang dimaksud seperti terjadinya degradasi lingkungan. Mulai dari rusaknya bentang alam, lenyapnya vegetasi permukaan, meningkatnya erosi, bahkan peristiwa banjir dan kekeringan, dan sejumlah kerusakan lingkungan lainnya. Meskipun dianggap termasuk sebagai pemicu peristiwa degradasi lingkungan, ancaman yang paling serius adalah adanya pencemaran merkuri. Pencemaran ini terjadi sebagai akibat para penambang menggunakan merkuri dalam usaha memisahkan emas dari material pembawanya.

⁵ *Ibid*, hal. 92

Selanjutnya merkuri yang tercampur dengan dengan air buangan kemudian mencemari air tanah dan sungai. Lalu terdapat katagori emas yang selama ini diburu oleh masyarakat penambang ialah *Emas Primer*, yaitu emas yang keberadaannya bersamaan mineral logam lainnya, seringkali dicirikan dengan adanya sejumlah urat-urat kuarsa. Kuarsa sendiri adalah salah satu mineral yang umum ditemukan di kerak kontinen bumi. Mineral ini memiliki struktur kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal terkristalisasi (silikon dioksida, SiO₂), dengan skala kekerasan Mohs 7 dan densitas 2,65 g/cm³.⁴

Bentuk umum kuarsa adalah prisma segienam yang memiliki ujung piramida segienam. Secara keseluruhan semua itu terbentuk sebagai hasil akhir dari aktivitas vulkanik. Selanjutnya *Emas sekunder*, yaitu yang umumnya terdapat pada dataran sungai baik yang purba maupun masa kini (*Recent*). Keterdapatn emas jenis ini umumnya merupakan hasil transportasi melalui media air.⁵

Mengenai kegiatan tambang rakyat selain pemerintah Provinsi/Kabupaten sudah semestinya Pemerintah Desa juga berperan untuk melakukan pengawasan kelestarian lingkungan yang ada di wilayahnya khususnya yang terdapat di Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin sendiri salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 7.668.61 km². Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini merupakan

⁴ Salim, *Hukum Penambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 91

⁵ *Ibid*, hal. 92

pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa.⁶

Dari luasnya wilayah kabupaten Merangin salah satu tempat yang penulis angkat ialah tambang emas rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Berdasarkan data di Kecamatan Renah diketahui: “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 terdapat 5 laporan diterima oleh Kepala Desa dari LSM terkait dengan adanya surat penghentian kegiatan tambang rakyat, tambang tersebut dinilai secara kegiatannya sudah mengabaikan kelestarian lingkungan yang dimana jangka panjangnya akan merusak lingkungan di Kecamatan Renah itu sendiri.”

Selanjutnya di Kecamatan Renah terdapat jenis tambang rakyat yaitu Tambang tradisional, Tambang menggunakan alat berat, Tambang gelondong/menggunakan air raksa untuk memisahkan emas dengan benda lain nya, hal ini menimbulkan pencemaran lingkungan seperti sungai keruh, erosi tanah dan longsor. Dari dampak yang ditimbulkan akibat tambang emas rakyat tersebut sudah semestinya pihak pemerintah desa melakukan pengawasan agar kelestarian lingkungan yang ada di Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Kabupaten Merangin tetap terjaga. Namun dalam kenyataannya pengawasan tersebut kurang dijalani.

⁶ <http://www.kabupatenmerangin.go.id/> diakses pada tanggal 21 November 2024 Pukul 22.10 WIB

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul : **“Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan pemerintah desa terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin ?
2. Apakah yang menjadi kendala pemertintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala pemertintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengawasan pemerintah desa terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai pengawasan pemerintah desa terhadap tambang rakyat di desa simpang parit kecamatan renah pembarap kabupaten merangin.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai pengawasan pemerintah desa terhadap tambang rakyat di desa simpang parit kecamatan renah pembarap kabupaten merangin.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pengawasan

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.⁷

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁹

3. Tambang Rakyat

Pertambangan rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dilakukan

⁷ Mulyadi, *Pemeriksaan Dalam Pengawasan*, Remaja Rosdakarya. Bandung, 2014, hal.16

⁸ Rozali Abdullah, *Hak Dan Kewajiban Daerah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hal.156

⁹ *Ibid*, hal. 157

oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.¹⁰

4. Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 7.668.61 km². Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa.¹¹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pengawasan** (*Supervision*) yang dimana Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹² Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian di atas

¹⁰ Absar Saleng, *Op Cit*, hal. 28

¹¹ <http://www.kabupatenmerangin.go.id/> diakses pada tanggal 21 November 2024 Pukul 22.10 WIB

¹² Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hal. 14

menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.¹³ Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan operasional yang boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan. Agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif atau yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan berbagai instrumen, seperti:¹⁴

- a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai merupakan target-target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang harus dijadikan pegangan dalam seluruh kegiatan operasional.

¹³ *Ibid*, hal.16

¹⁴ *Ibid*, hal.17

- b. Anggaran merupakan instrumen pengawasan karena dengan mudah diketahui berapa jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tertentu misalnya pembelian peralatan yang diperlukan dan pembayaran upah dan gaji.
- c. Data statistik dari berbagai segi operasional satu organisasi merupakan alat pengawasan yang sangat penting bagi manajemen.
- d. Laporan digunakan sebagai instrumen pengawasan jika pengawasan yang dilakukan jarak jauh, laporan dapat berbentuk laporan tertulis dan dapat juga laporan lisan.
- e. Auditing merupakan usaha verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada berbagai segi operasional dan organisasi, auditing dapat ditujukan pada bidang kepegawaian, bidang logistik, dan bidang finansial
- f. Observasi langsung dapat dilaksanakan sebagai teknik pengawasan yakni Para manajer melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh para bawahannya, Bersifat psikologis dalam artian bawahan akan merasa diperhatikan oleh atasannya.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan proposal penelitian ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*, yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber

daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan model pendekatan penelitian *Empiris*,¹⁶ suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan *Socio-Legal Research*¹⁷ yaitu melihat Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

3. Sumber Data

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini yaitu:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

¹⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016, hal. 72

¹⁷ *Ibid*, hal. 80

- a. Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan Perizinan Secara Online. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

4. Tehnik Penarikan Sample

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
- b. 2 Orang pekerja tambang rakyat Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
- c. 2 orang pihak LSM lingkungan.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup

dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab II disajikan Tinjauan umum tentang pengawasan dan pemerintah desa terdiri dari sub bab yaitu pengertian pengawasan, tujuan pengawasan, jenis jenis pengawasan, pengawasan publik bagi masyarakat, tugas wewenang pemerintah desa.

Bab III Tinjauan umum tentang pertambangan yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian pertambangan, dasar hukum pertambangan, kebijakan pemerintah dalam pengaturan pertambangan, pertambangan rakyat.

Bab IV akan disajikan hasil penelitian terdiri dari sub bab yaitu Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin lain yaitu Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Kendala pemertintah Desa dalam melakukan pengawasan Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.